

**SURVEY ZONA INTEGRITAS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN II (PERIODE APRIL 2024 – JUNI 2024)
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



**DISUSUN OLEH :
TIM SURVEY KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Peji syukur kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, akhirnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyelesaikan hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Triwulan I dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengadakan survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan kualitas layanan yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pengguna dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini bertujuan meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan menggunakan aplikasi e-Survey yang dikembangkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan - perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas dan masyarakat pengguna layanan kami.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Tim Survei

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEY ZONA INTEGRITAS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN II TAHUN 2024
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019

Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Rabu, 10 Juli 2024

Ketua



Tri Asnuri Herkunto, S.H.,MH

Sekretaris Utama



Meilyna Dwijanti, S.H.,MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	4
A. <u>LATAR BELAKANG</u>	4
B. <u>TUJUAN DAN SASARAN</u>	4
C. <u>RENCANA KERJA PELAKSANAAN</u>	4
D. <u>TAHAPAN PELAKSANAAN</u>	4
1. <u>Persiapan</u>	4
2. <u>Pelaksanaan Pengumpulan Data</u>	4
3. <u>Metode Survey</u>	5
E. <u>TARGET CAPAIAN PEKERJAAN</u>	5
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	6
BAB III PROFIL RESPONDEN	7
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	9
BAB V KESIMPULAN	11
LAMPIRAN	3

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Laporan Survey Zona Integritas (ZI) Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 (periode April 2024 – Juni 2024) ini sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

3. RENCANA KERJA PELAKSANAAN

Survey Zona Integritas (ZI) Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dilaksanakan pada periode April 2024 sampai dengan Juni 2024.

4. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

- a. Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- b. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu

dari petagas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

5. **METODE SURVEY**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali setahun) menggunakan aplikasi *SiSuper Badiium*.

6. **TARGET CAPAIAN PEKERJAAN**

Target yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Survey Persepsi Anti Korupsi adalah sebanyak 59 responden untuk periode Survey Persepsi Anti Korupsi bulan April 2024 – Juni 2024.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

1. METODOLOGI SURVEY

Metode Survey ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif.

2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan jawaban tertutup dan terbuka. Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 33 orang responden yg di ambil secara simple random sampling, terdiri dari:

1. PNS
2. TNI
3. POLRI
4. SWASTA
5. WIRUSAHA
6. TENAGA KONTRAK
7. LAIN-LAIN

3. TEKNIK ANALISA DATA

Setelah data terkumpul data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif yang sudah terintegrasi dalam *Aplikasi SiSuper Badilum*.

4. VARIABEL PENGUKURAN ZONA INTEGRITAS (ZI) PERSEPSI ANTI KORUPSI

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pendirian Pelaksanaan Survey dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*) pada Direktorat Jendral Badan Peradilan umum yang terdiri dari 5 (lima) ruang lingkup antara lain:

1. Diskriminasi Pelayanan
2. Pelayanan Diluar Prosedur
3. Penerimaan Imbalar/Suap
4. Pungutan Liar
5. Praktik Percaloan

BAB III

PROFIL RESPONDEN

1. UMUR RESPONDEN

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 58 responden, umur pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	20	34,48
29 - 39 Th	14	24,14
40 - 49 Th	9	15,52
50 - 59 Th	11	18,97
60 - 69 Th	4	6,90
Total	58	

Sumber: Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum P N Yogyakarta Tahun II Tahun 2024.

Dan dapat disimpulkan mayoritas responden ini berumur 18 - 28 tahun yaitu 20 orang dari total 37 atau 34,48%.

2. PENDIDIKAN TERAKHIR RESPONDEN

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 59 responden, dan pendidikan terakhir pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini :

NO	JENIS PENDIDIKAN	FREKUENSI	
		JUMLAH	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMU	24	41,37
5	Diploma	3	5,17
8	S1	31	53,44
9	S2	1	1,72
10	S3	0	0
	Jumlah	59	100

Sumber: Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum P N Yogyakarta Tahun II Tahun 2024.

Dan dapat disimpulkan bahwa mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah S1 yang berjumlah 31 orang dari total responden 59 orang atau 53,44%.

3. JENIS KELAMIN RESPONDEN

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 59 responden, dan jenis kelamin pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini :

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Laki - Laki	27	45,76
2	Perempuan	32	54,23
	Jumlah	59	100

Sumber: Aplikasi

Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum P N Yogyakarta Tahun II Tahun 2024.

Dan dapat disimpulkan mayoritas responden terbanyak berjenis kelamin Perempuan yang berjumlah 32 orang dari total 59 orang atau 54,23%.

4. PEKERJAAN UTAMA RESPONDEN

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 59 responden, dan pekerjaan pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini :

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	PNS	10	16,94
2	TNI	2	3,38
3	POLRI	3	5,08
4	Pegawai Swasta	20	33,89
5	Wirausaha	1	1,69
6	Teraga Kontrak	0	0
7	Lainnya	23	38,98
Jumlah		59	100

Sumber:
Aplikasi

Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Penyelenggara Umum P N Yogyakarta Trisulan II Tahun 2024.

Dan mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah LAINNYA yang berjumlah 23 orang dari total responden 59 orang atau 38,98%.

5. DAERAH DOMISILI

Dari hasil survei yang diperoleh data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (*SISUPER*), pengguna layanan yang mengisi survei sebanyak 59 responden dari domisili/tempat tinggal pengguna layanan/responden ditampilkan dalam tabel berikut ini:

NO	Daerah Domisili	Frekuensi	
		Jumlah	%
1	Jawa Barat	3	5,08
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	54	91,52
3	Jawa Tengah	1	1,69
4	Jawa Timur	1	1,69
Total		59	100

Sumber: Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Penyelenggara Umum P N Yogyakarta Trisulan II Tahun 2024.

Dan mayoritas Daerah Domisili Responden adalah dari Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 54 responden atau 91,52%.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan di peroleh Survey Zona Integritas (ZI) Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024 Unit Pelayanan sebesar 3,98 / 99,49% yang herada pada kategori A (Sangat Baik). Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing - masing ruang lingkup pelayanan sebagai berikut:

A. DISKRIMINASI PELAYANAN

Hasil analisis pada ruang lingkup Diskriminasi Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

<i>DISKRIMINASI PELAYANAN (U1)</i>	
<i>Jumlah</i>	234
<i>NRR Per RI. (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)</i>	3,966
<i>NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))</i>	6,793

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum PN Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Diskriminasi Peraturan ini menunjukan hasil pada index 3,966 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika donversikan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Diskriminasi Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk kedalam kategori **Sangat Baik** atau **TIDAK ADA DISKRIMINASI** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,966.

B. PELAYANAN DILUAR PROSEDUR

Hasil analisis pada ruang lingkup Pelayanan Diluar Prosedur secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

<i>PELAYANAN DILUAR PROSEDUR (U2)</i>	
<i>Jumlah</i>	235
<i>NRR Per RI. (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)</i>	3,983
<i>NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))</i>	6,797

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum PN Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan diluar prosedur ini menunjukan hasil pada index 3,983 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika donversikan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Pelayanan Diluar Prosedur di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori **Sangat Baik** atau **PELAYANAN SELALU SESUAI DENGAN PROSEDUR** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,983.

C. PENERIMAAN IMBALAN/SUAP

Hasil analisis pada ruang lingkup Penerimaan Imbalan/Suap secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

<i>PENERIMAAN SUAP (U3)</i>	
<i>Jumlah</i>	235
<i>NRR Per RI. (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)</i>	3,983
<i>NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))</i>	6,797

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum PN Yogyakarta Triwulan II Tahun 2024.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penerimaan Imbalan/Suap ini menunjukkan hasil pada index 3,983 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika dibandingkan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Penerimaan Imbalan/Suap di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori **Sangat Baik** atau **PETUGAS TIDAK PERNAH MENRIMA IMBALAN/SUAP** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,983.

D. PUNGUTAN LIAR

Hasil analisis pada ruang lingkup Pungutan Liar secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

<i>PUNGUTAN LIAR (U4)</i>	
<i>Jumlah</i>	234
<i>NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)</i>	3,966
<i>NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))</i>	0,793

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum PN Yogyakarta Terwujud II Tahun 2024.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada index 3,966 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika dibandingkan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Pungutan Liar di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori **Sangat Baik** atau **TIDAK PERNAH TERJADI PUNGUTAN LIAR** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,966.

E. PRAKTIK PERCALOAN

Hasil analisis pada ruang lingkup Praktik Percaloan secara ringkas disajikan dalam tabel dan grafik berikut ini:

<i>PRAKTIK PERCALOAN (U5)</i>	
<i>Jumlah</i>	236
<i>NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)</i>	4,000
<i>NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))</i>	0,800

Sumber: Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum PN Yogyakarta Terwujud II Tahun 2024.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 atau dalam nilai konversi 3,26 - 4,00 atau 81,26 – 100,00. Jika dibandingkan dengan nilai mutu layanan dalam kategori A atau **Sangat Baik**. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Praktik Percaloan di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori **Sangat Baik** atau **TIDAK PERNAH ADA PRAKTIK PERCALOAN** dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00.

BAB V KESIMPULAN

I. KESIMPULAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan diperoleh nilai hasil Survey Zona Integritas (ZI) Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Triwulan I Tahun 2024 Unit Pelayanan sebesar 4,00/100 % yang berada pada kategori A (Sangat Baik).

Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

1. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Diskriminasi Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *TIDAK ADA DISKRIMINASI* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,966
2. Mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Pelayanan Diluar Prosedur di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *PELAYANAN SELALU SESUAI DENGAN PROSEDUR* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,983.
3. Mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Penerimaan Imbalan/Suap Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *PETUGAS TIDAK PERNAH MENRIMA IMBALAN/SUAP* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,983.
4. Mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Pungutan Liar di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *TIDAK PERNAH TERJADI PUNGUTAN LIAR* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,966
5. Mayoritas responden menyatakan ruang lingkup Praktik Percaloan di Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk dalam kategori *TIDAK PERNAH ADA PRAKTIK PERCALOAN* dengan nilai NRR Per-RL yaitu 4,00.

II. 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH DAN TINDAK LANJUT

a. 3 (tiga) Unsur Terendah

Berdasar aplikasi SIUPER Bacilum yaitu Perhitungan Indeks ZI Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap 37 responden pada triwulan I, memperoleh nilai hasil Survey 4,00 / 100% hasil ini masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Hasil Survey ZI Anti Korupsi tersebut merupakan rumusan dari 5 ruang lingkup/unsur yang memiliki indeks sebagai berikut :

No	Ruang Lingkup	Nilai Per RL	Kategori	Peringkat
1.	DISKRIMINASI PELAYANAN	3,966	Sangat Baik	4
2.	PELAYANAN DI LUAR PROSEDUR	3,983	Sangat Baik	3
3.	PENERIMAAN IMBALAN/SUAP	3,983	Sangat Baik	2
4.	PUNGUTAN LIAR	3,966	Sangat Baik	5
5.	PRAKTIK PERCALOAN	4,00	Sangat Baik	1

Dari ruang lingkup – ruang lingkup diatas terdapat: 3 (tiga) ruang lingkup terendah dan perlu untuk ditindak lanjuti, yaitu :

1. Pungutan Liar.
2. Diskriminasi Pelayanan.
3. Pelayanan Diluar Prosedur.

A. Tindak Lanjut Terhadap 3 (tiga) Unsur Terendah

Terhadap 3 (tiga) unsur terendah hasil Indeks Survey ZI Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Yogyakarta masih masuk dalam kategori sangat baik atau dalam nilai A. Namun perlu diadakan evaluasi/tindak lanjut terhadap 3 (tiga) unsur terendah tersebut dengan cara :

1. **Pungutan Liar**

Dari hasil survey yang yang diambil dari aplikasi SiSuper di Pengadilan Negeri, Yogyakarta diperoleh data seperti tabel berikut ini :

<i>PUNGUTAN LIAR (U4)</i>	
<i>Jumlah</i>	234
<i>NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)</i>	3,966
<i>NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))</i>	0,793

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari pungutan liar karena mempunyai nilai NRR Per RL 3.966.

Namun nilai tersebut masuk dalam 3 (tiga) unsur terendah, dalam hal ini untuk mengatasi hal tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Telah dibentuknya Tim Pengendali Gratifikasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 27/KPN/SK.KP/III/2024.
2. Selalu diperdengarkan *Voice Warning System* himbuan Ketua tentang anti gratifikasi, penyuapan dan pungutan liar.
3. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menerapkan SMAP (Sistim Manajemen Anti Penyuapan).
4. Adanya media pengaduan yang dapat dilakukan langsung melalui loket pengaduan, kotak pengaduan maupun melalui secara online melalui aplikasi Siwas.
5. Setiap transaksi/pembayaran selalu diberikan tanda terima (kwitansi).
6. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta selalu diadakan breffing pagi untuk petugas PTSP yang dipimpin oleh unsur pimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
7. Pemasangan panflet dan banner tentang kampanye anti gratifikasi dan pungutan liar di lingkungan Pengadilan Negeri yogyakarta.
8. Menekankan untuk petugas layanan khususnya petugas PTSP agar melayani pengguna layanan agar sesuai dengan SOP.

2. **Diskriminasi Pelayanan**

Dari hasil survey yang yang diambil dari aplikasi SiSuper di Pengadilan Negeri, Yogyakarta diperoleh data seperti tabel berikut ini :

<i>DISKRIMINASI PELAYANAN (U1)</i>	
<i>Jumlah</i>	234
<i>NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)</i>	3,966
<i>NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))</i>	0,793

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari dikriminasi pelayanan karena mempunyai nilai NRR Per RL 3,966.

Namun nilai tersebut masuk dalam 3 (tiga) unsur terendah, dalam hal ini untuk mengatasi hal tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menggunakan antrian secara elektronik, sehingga antrian pelayanan dilayani secara teratur dan sesuai dengan antrian.
2. Di PTSP Pengadilan Negeri Yogyakarta juga sudah disediakan loket pelayanan prioritas dan juga loket untuk pelayanan penyandang disabilitas.
3. Menekankan untuk petugas layanan khususnya petugas PTSP agar melayani pengguna layanan agar sesuai dengan SOP.

3. Pelayanan Diluar prosedur

Dari hasil survey yang yang diambil dari aplikasi SiSuper di Pengadilan Negeri, Yogyakarta diperoleh data seperti tabel berikut ini :

<i>PELAYANAN DILUAR PROSEDUR (U2)</i>	
<i>Jumlah</i>	235
<i>NRR Per RL (Jumlah Nilai Per-ruang Lingkup/Jumlah Kuesioner)</i>	3,983
<i>NRR Tertimbang (NRR Per-ruang Lingkup X (1/5))</i>	0,797

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari dikriminasi pelayanan karena mempunyai nilai NRR Per RL 3,983.

Namun nilai tersebut masuk dalam 3 (tiga) unsur terendah, dalam hal ini untuk mengatasi hal tersebut di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Menekankan untuk petugas layanan khususnya petugas PTSP agar melayani pengguna layanan agar sesuai dengan SOP.
2. Menekankan agar para petugas pelayanan (Petugas PTSP) agar melayanani dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

Demikian tindak lanjut atas 3 (tiga) unsur terendah dari laporan survey ZI Persepsi Kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

LAMPIRAN

TANGKAPAN LAYAR HASIL SURVEY ZONA INTEGRITAS (ZI) PERSEPSI ANTI KORUPSI

I. INDEKS TOTAL, JUMLAH RESPONDEN, JENIS KELAMIN, PENDIDIKAN DAN PEKERJAAN

ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NILAI INDEKS 3,98 / 99,49 % Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024	JENIS KELAMIN	WAPORNYA	
		LAKI-LAKI	27 ORANG
		PETEMPAN	32 ORANG
	PENDIDIKAN	Tidak Sekolah (0 ORG)	Oporsi 2 (1 ORG)
		SD (3 ORG)	Oporsi 1 (3 ORG)
		SLP (0 ORG)	S1 (3 ORG)
		SMA (24 ORG)	S2 (1 ORG)
		Oporsi 1 (0 ORG)	S3 (3 ORG)
	PEKERJAAN	PAK (10 ORG)	SINISTA (3 ORG)
		TKI (2 ORG)	WAWASAN (1 ORG)
	POLRI (3 ORG)	TEKNIK (3 ORG)	
	LAINNYA (20 ORG)		

II. DOMISILI RESPONDEN

Daerah Domisili	Jumlah (Orang)
1. JAWA BARAT	3
2. JAWA TENGAH	1
3. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	54
4. JAWA TIMUR	1

III. UMUR RESPONDEN

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
15 - 20 Th	20	34,48
21 - 30 Th	14	24,14
31 - 40 Th	9	15,52
41 - 50 Th	11	18,97
51 - 60 Th	4	6,90
Total	58	

IV. NILAI PERUNSUR

Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	Peterson
Jumlah	234	736	210	266	220	
NRG Peroleh	3.956	3.505	3.683	3.506	4.001	14.651
Nilai Instrum	0.730	0.737	0.797	0.733	0.700	3.680
IVK ZI Unit Yogyakarta						99,49

V. TIGA (3) UNSUR TERENDAH

No.	Unsur	Nilai
1.	Apakah terdapat informasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini?	104
2.	Apakah terdapat petunjuk lain seperti pemindaian pembayaran dan lain-lain yang jika pengguna layanan di larat resmi pada unit layanan ini?	104
3.	Apakah terdapat pelayanan atau prosedur standar yang terdapat di layanan pada unit layanan ini?	105